



Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Dinamika Politik dalam Kebijakan BPJS Kesehatan di Puskesmas Tuntungan

Irfan Sazali Nasution^{1*}, Rara Aulia Alzazira², Dhea Syapira³, Cindi Aulia Ali⁴, Efrida⁵,
Nayla Raihani Malau⁶, M. Daffa Almuzaki⁷

¹⁻⁷ Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,
Indonesia

Alamat: Jl. Lap. Golf No.120, Kp. Tengah, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera
Utara

Korespondensi penulis: irfan1100000177@uinsu.ac.id*

Abstract. *This study aims to investigate the perceptions of the community in Puskesmas Tuntungan, Jl. Kutalimbaru, Desa Tuntungan I, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, regarding the impact of political dynamics on BPJS Health policy in Puskesmas Tuntungan. Using a quantitative approach with 100 respondents, the results show that the majority of respondents are aware of the frequent changes in BPJS policy. This study concludes that the community has diverse and critical perceptions of the dynamics of BPJS Health policy and its relation to political conditions.*

Keywords: *BPJS Health, political dynamics, public perception*

Abstrak. Dinamika politik yang terjadi di Indonesia sering sekali mempengaruhi kebijakan publik termasuk BPJS kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat di Puskesmas Tuntungan Jl. Kutalimbaru, Desa Tuntungan I, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terhadap dampak dinamika politik dalam kebijakan BPJS Kesehatan di Puskesmas Tuntungan. Dengan pendekatan kuantitatif terhadap 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menyadari perubahan kebijakan BPJS yang sering terjadi. Penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat memiliki perbedaan persepsi yang cukup kritis terhadap dinamika kebijakan BPJS Kesehatan dan kaitannya dengan kondisi politik.

Kata kunci: BPJS Kesehatan, dinamika politik, persepsi masyarakat

1. LATAR BELAKANG

Dinamika politik sering mempengaruhi arah kebijakan, terutama saat terjadi pergantian pemerintahan, tekanan fiskal, atau respons terhadap krisis kesehatan seperti pandemi. Di tingkat lokal, seperti di Puskesmas Tuntungan Jl. Kutalimbaru, Desa Tuntungan I, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, masyarakat menghadapi tantangan dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan kebijakan yang terus berubah. Wilayah ini merupakan salah satu wilayah dengan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang cukup tinggi, dan dinilai memiliki keragaman latar belakang sosial yang mencerminkan masyarakat pengguna layanan kesehatan secara umum. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap dampak dinamika politik dalam kebijakan BPJS Kesehatan.

2. KAJIAN TEORITIS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia (Solechan, 2019).

Dinamika politik sering mempengaruhi arah kebijakan, terutama saat terjadi pergantian pemerintahan, tekanan fiskal, atau respons terhadap krisis kesehatan seperti pandemi. Menurut penelitian oleh Nuraini (2022) dalam *eJournal Administrasi Publik*, terdapat korelasi antara kepentingan politik jangka pendek dengan perubahan kebijakan BPJS yang berdampak pada kualitas dan keberlanjutan layanan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana masyarakat memersepsikan dampak dinamika politik terhadap kebijakan BPJS Kesehatan yang mereka rasakan secara langsung (Nuraini & Syahputra, 2022).

3. METODE PENELITIAN

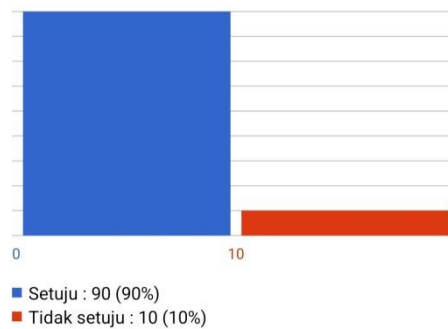
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif menggunakan kuesioner. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk memperoleh gambaran umum mengenai persepsi masyarakat terhadap pengaruh dinamika politik terhadap kebijakan BPJS Kesehatan. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2025 di Puskesmas Tuntungan Jl. Kutalimbaru, Desa Tuntungan I, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di wilayah tersebut yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini meliputi: berusia 18 tahun ke atas, merupakan peserta aktif BPJS, pernah menggunakan layanan BPJS minimal satu kali dalam setahun terakhir, serta bersedia untuk mengisi kuesioner. Dari populasi tersebut, peneliti mengambil sampel sebanyak 100 orang.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator persepsi masyarakat terhadap perubahan kebijakan BPJS, khususnya dalam aspek pemahaman terhadap kebijakan, kepuasan terhadap pelayanan, serta pandangan mengenai perubahan yang terjadi akibat dinamika politik. Kuesioner tersebut menggunakan skala Likert dengan dua pilihan jawaban yaitu “setuju” dan “tidak setuju”.

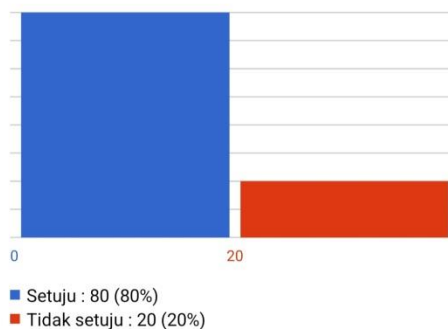
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi terhadap Perubahan Kebijakan



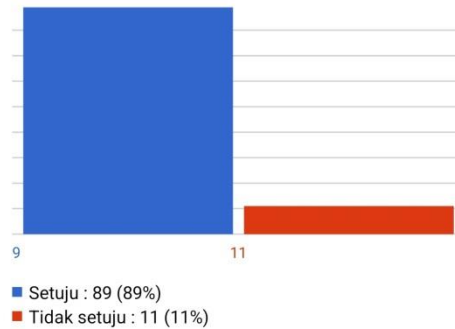
Gambar 1. Responden menyadari bahwa kebijakan BPJS sering mengalami perubahan

Mayoritas responden menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap dinamika kebijakan BPJS Kesehatan. Sebanyak 90% responden menyatakan setuju bahwa kebijakan BPJS sering mengalami perubahan, sementara 10% sisanya menyatakan tidak setuju. Persentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memperhatikan adanya perubahan-perubahan yang terjadi, baik dari sisi iuran, prosedur layanan, maupun sistem rujukan yang diberlakukan. Tingginya tingkat kesadaran ini dapat disebabkan oleh pengalaman langsung masyarakat saat mengakses layanan BPJS, terutama ketika kebijakan baru diberlakukan tanpa sosialisasi yang memadai (Handayani et al., 2019).



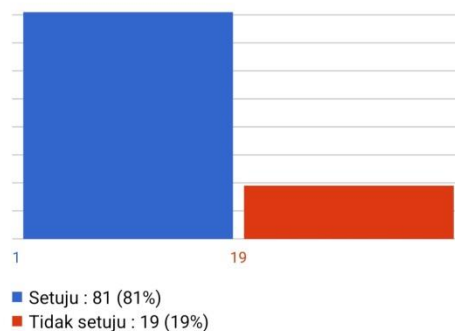
Gambar 2. Responden mengikuti perkembangan berita tentang perubahan kebijakan BPJS.

Mayoritas hasil menunjukkan bahwa responden mengikuti perkembangan berita tentang perubahan dari kebijakan BPJS Kesehatan. Dimana diantaranya ada 80% responden yang menyatakan setuju dan 20% lagi menyatakan tidak setuju. Presentase ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di lokasi penelitian tidak ketinggalan berita perkembangan-perkembangan baru oleh kebijakan BPJS Kesehatan (Nuraini & Syahputra, 2022).



Gambar 3. Responden merasa bingung dengan seringnya perubahan kebijakan BPJS.

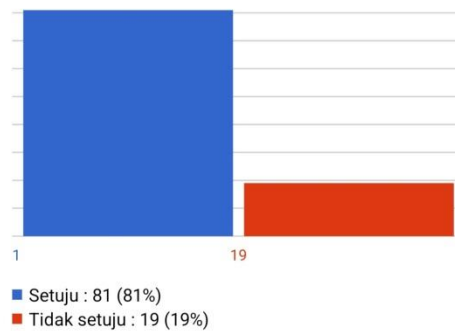
Mayoritas hasil menunjukkan bahwa masih banyak responden yang merasa bingung terkait perubahan-perubahan yang terlalu sering dari kebijakan BPJS Kesehatan. Terdapat 89% responden yang setuju dengan pernyataan kuesioner dan sisanya 11% menyatakan tidak setuju. Hasil ini sejalan dengan penelitian solechan, yang juga menunjukkan bahwa banyak yang masih merasa bingung (Solechan, 2019).



Gambar 4. Perubahan kebijakan BPJS mempengaruhi kemudahan responden dalam menggunakan layanan kesehatan.

Selain menyadari adanya perubahan kebijakan dan merasa bingung atas perubahan kebijakan, mayoritas responden juga merasakan dampaknya secara langsung dalam hal kemudahan mengakses layanan kesehatan. Mayoritas sebanyak 81% responden menyatakan setuju bahwa perubahan kebijakan BPJS memengaruhi kenyamanan dan kemudahan mereka dalam menggunakan layanan kesehatan tersebut. Sementara itu, hanya 19% yang menyatakan tidak setuju. Hasil ini mencerminkan bahwa perubahan yang terjadi seperti perubahan prosedur rujukan, batasan layanan, atau kebijakan iuran tidak hanya disadari oleh masyarakat, tetapi juga memberi dampak nyata dalam pengalaman mereka mengakses layanan. Banyak responden mengungkapkan bahwa proses administrasi sering berubah tanpa penjelasan yang memadai, sehingga menimbulkan kebingungan saat berobat (Kurniawan et al., 2024).

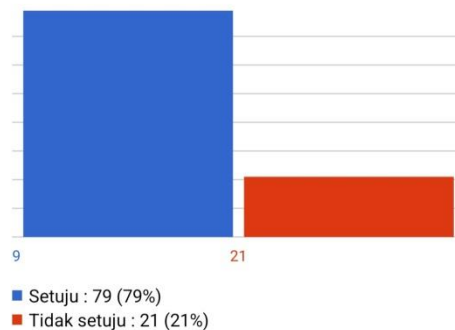
Persepsi terhadap Politik dan Kebijakan BPJS



Gambar 5. Responden percaya bahwa kebijakan BPJS dipengaruhi oleh keputusan politik.

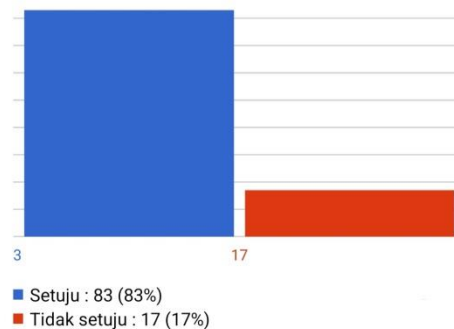
Pandangan masyarakat terhadap keterlibatan politik dalam kebijakan BPJS juga terlihat cukup kuat dilihat dari hasil penelitian ini. Mayoritas sebanyak 81% responden menyatakan setuju bahwa kebijakan BPJS dipengaruhi oleh keputusan-keputusan politik. Sementara itu, 19% responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menyadari bahwa sistem jaminan kesehatan nasional tidak sepenuhnya bebas dari dinamika kekuasaan dan arah kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa (Maulida & Siregar, 2022).

Tingginya angka persetujuan ini bisa jadi mencerminkan kekecewaan atau ketidakpercayaan terhadap stabilitas kebijakan publik, terutama saat terjadi perubahan signifikan setiap kali ada pergantian pejabat atau pemerintahan. Banyak masyarakat merasa bahwa kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti BPJS, seharusnya bersifat konsisten dan berjangka panjang, bukan mengikuti arah politik jangka pendek. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan publik, penting bagi pemerintah untuk menjaga kontinuitas dan transparansi dalam setiap perubahan kebijakan (Kartika & Rahman, 2021).



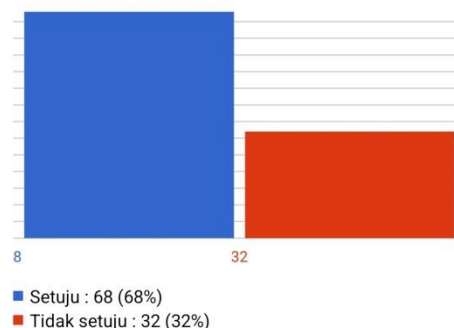
Gambar 6. Responden merasa kepentingan politik lebih dominan daripada kepentingan masyarakat dalam kebijakan BPJS.

Mayoritas responden juga menilai bahwa dalam penyusunan perubahan kebijakan BPJS menonjolkan kepentingan politik cenderung lebih diutamakan. Presentase hasil kuesioner menunjukkan bahwa 79% responden merasa setuju dan 21% diantaranya tidak setuju. Pandangan ini mungkin bisa muncul karena pengalaman masyarakat sendiri yang melihat bagaimana kebijakan BPJS berubah tanpa kejelasan arah atau dasar pertimbangannya. Jadi, beberapa responden mengaitkan pengalaman itu dengan dinamika politik tertentu (Hidayat & Lestari, 2021).



Gambar 7. Kebijakan BPJS sering berubah tergantung pada siapa yang sedang berkuasa.

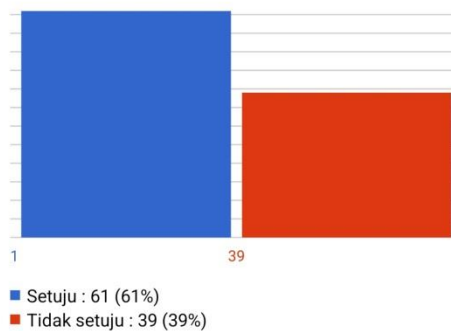
Mayoritas responden merasa bahwa kebijakan BPJS sering berubah tergantung pada siapa yang sedang berkuasa. Sebanyak 83% responden menyatakan setuju, sementara 17% sisanya menyatakan tidak setuju. Angka presentase ini memperkuat pandangan masyarakat bahwa keberlangsungan dan arah kebijakan sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan di tingkat pemerintahan. Jika persepsi ini terus berkembang, maka kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan jaminan sosial bisa semakin tergerus. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun sistem kebijakan yang lebih konsisten, berbasis bukti, dan tahan terhadap perubahan politik (Malik, 2019).



Gambar 8. Responden merasa kebijakan BPJS digunakan untuk kepentingan politik tertentu.

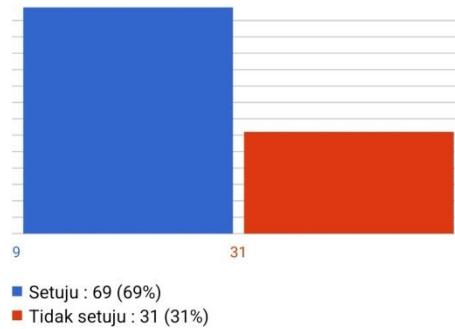
Mayoritas sebanyak 68% responden yang setuju bahwa kebijakan BPJS digunakan untuk kepentingan politik tertentu, tetapi 32% lainnya tidak setuju. Presentase ini mengidentifikasi bahwa sebagian besar masyarakat memandang kebijakan jaminan kesehatan jauh dari kata netral, melainkan memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi alat dalam strategi politik, baik membangun citra yang baik ataupun menggalang dukungan pihak tertentu. Oleh karena itu, penting bagi para pemerintah untuk membangun transparansi dalam proses perumusan perubahan kebijakan dan memisahkan urusan pelayanan dari politik (Sutan & Al Hamdi, 2020).

Dampak terhadap Pelayanan



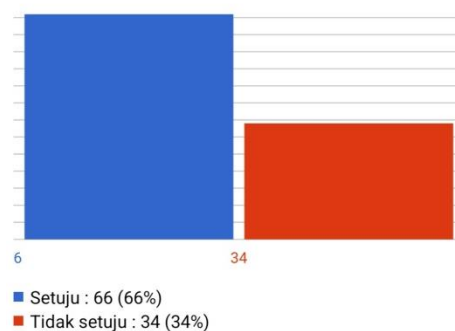
Gambar 8. Responden puas dengan pelayanan BPJS saat ini.

Mayoritas sebanyak 61% responden merasa puas dengan pelayanan yang ada pada BPJS saat ini dan 39% lainnya merasa tidak setuju dengan hal itu. Angka presentase ini menunjukkan meskipun lebih banyak hasil masyarakat yang merasa puas tetapi yang merasa tidak puas juga tidak sedikit. Mungkin ada beberapa alasan masyarakat merasa tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan mereka merasa pelayanan BPJS belum sepenuhnya sesuai harapan. Perbaikan mutu layanan di tingkat fasilitas dan peningkatan literasi layanan bagi masyarakat sangat penting dan harus menjadi hal yang paling utama untuk mengurangi kesenjangan persepsi seperti ini (Tedi, 2022).



Gambar 9. Responden merasa pelayanan BPJS memburuk karena seringnya perubahan kebijakan.

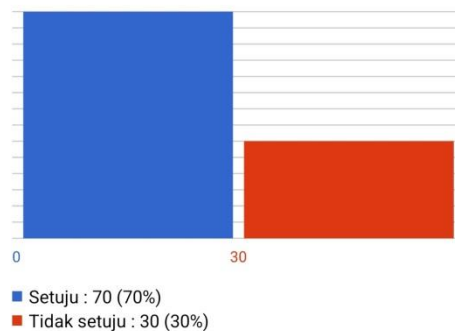
Mayoritas masyarakat menilai adanya hubungan langsung adanya ketidakstabilan kebijakan dan penurunan kualitas pelayanan di lapangan. Sebanyak 69% responden menyatakan setuju bahwa pelayanan BPJS memburuk karena seringnya perubahan kebijakan, sementara itu 31% responden menyatakan tidak setuju. Perubahan kebijakan yang terlalu sering juga dapat membuat masyarakat merasa bingung dan merasa tidak nyaman. Oleh karena itu para penanggung jawab kebijakan dan pemerintah agar menjamin kesinambungan dan kejelasan kebijakan agar pelayanan tetap stabil dan terpercaya di mata masyarakat (Malik, 2019).



Gambar 10. Responden merasa petugas kesehatan tidak selalu paham dengan kebijakan BPJS terbaru.

Mayoritas responden yang setuju bahwa petugas kesehatan tidak selalu paham dengan kebijakan BPJS terbaru. 66% responden setuju dan 34% lainnya tidak setuju. Data ini mengidentifikasi bahwa sebagian besar masyarakat merasakan adanya ketimpangan informasi antara perubahan kebijakan yang dikeluarkan dan pemahaman petugas yang bertugas. Banyak responden mengatakan bahwa beberapa petugas terkadang meminta waktu untuk memastikan kebijakan atau informasi terbaru. Penguatan sosialisasi internal dan pelatihan berkelanjutan

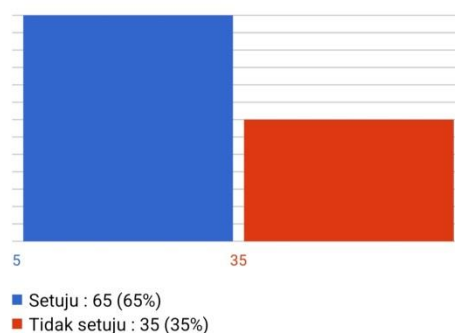
bagi petugas sangat penting untuk menjaga konsistensi pelayanan di lapangan (Nuraini & Syahputra, 2022).



Gambar 11. Responden merasa pelayanan BPJS stabil walau kebijakan sering berubah.

Menariknya, meskipun banyak responden yang merasa bahwa perubahan kebijakan berdampak pada pelayanan, hasil ini menunjukkan mayoritas responden tetap merasa setuju bahwa pelayanan BPJS masih stabil walau kebijakan sering mengalami perubahan. Mayoritas terdapat 70% yang setuju dan 30% tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini mencerminkan adanya persepsi positif dari sebagian besar masyarakat terhadap upaya pelayanan yang tetap dijalankan secara konsisten di tengah dinamika regulasi. Namun demikian, persepsi ini tetap harus dibarengi dengan evaluasi berkala, untuk memastikan bahwa kualitas layanan tidak hanya tampak stabil di permukaan, tetapi juga efektif dan sesuai harapan peserta di semua tingkatan layanan (Kurniawan et al., 2024).

Akses terhadap Informasi Kebijakan

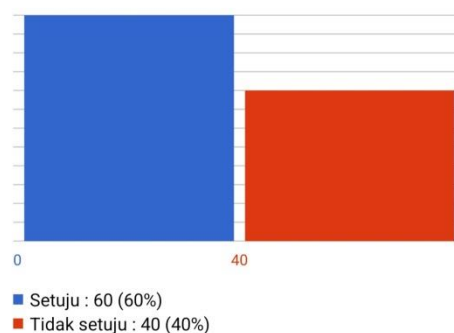


Gambar 12. Responden mendapatkan informasi yang jelas tentang kebijakan BPJS terbaru.

Mayoritas sebanyak 65% responden menyatakan setuju bahwa mereka mendapatkan informasi yang jelas mengenai kebijakan BPJS terbaru, sementara 35% lainnya tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa memiliki akses terhadap informasi

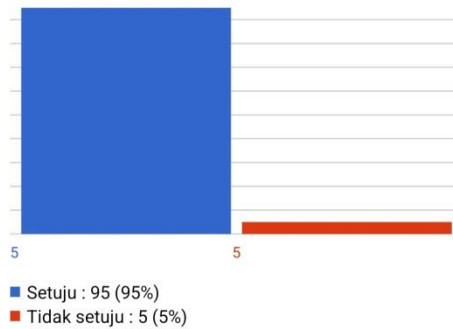
terkait perubahan atau pembaruan kebijakan BPJS, meskipun masih ada sepertiga responden yang mengaku belum mendapatkan informasi secara memadai (Wulandari & Saputra, 2022)

Namun, angka 35% yang tidak setuju tetap perlu menjadi perhatian, karena menunjukkan bahwa upaya penyebarluasan informasi masih belum menjangkau semua kalangan secara merata. Ketimpangan ini bisa disebabkan oleh perbedaan tingkat pendidikan, akses terhadap media digital, atau kurangnya penekanan pada sosialisasi langsung di tingkat komunitas. Oleh karena itu, strategi komunikasi kebijakan perlu terus diperkuat agar informasi tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat (Hidayat & Lestari, 2021)



Gambar 13. Sosialisasi dari pemerintah tentang perubahan kebijakan BPJS cukup baik.

Mayoritas 60% responden yang menyatakan setuju bahwa sosialisasi dari pemerintah tentang perubahan kebijakan BPJS cukup baik dan 40% lainnya menyatakan tidak setuju akan hal itu. Hasil presentase ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat merasa setuju dan mengapresiasi upaya pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait perubahan kebijakan, masih terdapat sebagian yang merasa proses sosialisasi tersebut belum maksimal. Namun, karena cukup besarnya responden yang menyatakan tidak setuju sepertinya diperlukan pendekatan sosialisasi yang lebih inklusif dan berlapis agar seluruh masyarakat benar-benar memahami kebijakan yang baru (Kartika & Rahman, 2021).



Gambar 14. Responden merasa masyarakat perlu lebih dilibatkan dalam evaluasi kebijakan BPJS.

Mayoritas responden, yaitu sebesar 95%, menyatakan setuju bahwa masyarakat perlu lebih dilibatkan dalam proses evaluasi kebijakan BPJS, sementara hanya 5% yang tidak setuju. Tingginya angka ini mencerminkan kuatnya aspirasi publik untuk berperan aktif dalam sistem jaminan kesehatan yang mereka gunakan sehari-hari. Para responden meyakini bahwa pelibatan masyarakat tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan realitas di lapangan (Haryanti, 2024).

Banyak responden merasa bahwa selama ini suara mereka jarang didengar dalam perumusan maupun evaluasi kebijakan, padahal mereka adalah pihak yang langsung terdampak oleh setiap perubahan. Oleh karena itu, membuka kanal partisipasi publik secara aktif dan terstruktur akan menjadi langkah strategis untuk memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program BPJS Kesehatan (Maulida & Siregar, 2022).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat memiliki perbedaan persepsi yang cukup kritis terhadap dinamika kebijakan BPJS Kesehatan dan kaitannya dengan kondisi politik. Perubahan kebijakan dianggap mempengaruhi kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan. Kebijakan BPJS sangat dipengaruhi oleh keputusan politik. Pelayanan BPJS masih cukup stabil, peningkatan sosialisasi dan informasi dirasa cukup tersedia serta masyarakat berharap lebih dilibatkan dalam evaluasi kebijakan.

DAFTAR REFERENSI

- Handayani, T., Hamdani, M., & Pantawis, S. (2019). Analisis Pengaruh Timeliness, Apology, Redress, Facilitation, Credibility Dan Attentiveness Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Bpjs Kesehatan Di Kabupaten Batang). *Sains: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 11(2), 254-273.
- Haryanti, A. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Etika Politik Calon Pemimpin Negeri Tahun 2024. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 15(1), 1-19.
- Hidayat, R., & Lestari, S. (2021). Dinamika Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 9(2), 102–112.
- Kartika, D. P., & Rahman, A. (2021). Efektivitas Sosialisasi Kebijakan BPJS Kesehatan di Wilayah Perdesaan. *Jurnal Komunikasi Publik*, 7(1), 45–56.
- Kurniawan, D., Febriani, S., Hrp, N. N., & Berlianti, B. (2024). Pengalaman dan Persepsi Pengguna terhadap Layanan BPJS Kesehatan di Kelurahan Sei Agul, Kota Medan. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(6), 55-66.
- Malik, A. A. (2019). Implementasi kebijakan diskresi pada pelayanan kesehatan badan penyelenggara jaminan kesehatan (bpjs). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 8(1), 1-8.
- Maulida, N., & Siregar, H. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Kesehatan*, 10(3), 188–197.
- Nuraini, R., & Syahputra, D. (2022). Pemahaman Petugas Kesehatan terhadap Perubahan Kebijakan BPJS dan Dampaknya terhadap Kualitas Pelayanan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nusantara*, 8(1), 23–34.
- Solechan, S. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 686-696.
- Sutan, A. J., & Al-Hamdi, R. (2020). Keadilan semi-libertarianisme pada sistem kesehatan di indonesia: analisis komparatif pemikiran bentham dan kant terhadap implementasi konsep keadilan pada kebijakan bpjs–kesehatan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 9(03), 125-135.
- TEDI, A. S. (2022). ANALISIS DAMPAK KENAIKAN IURAN BPJS KELAS 1, 2, DAN 3 TERHADAP PENGGUNA BPJS KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Masyarakat Lampung Utara) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Wulandari, R., & Saputra, B. (2022). Transparansi dan Akses Informasi dalam Kebijakan BPJS: Perspektif Pengguna Layanan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 11(4), 210–222.